

## RELASI MEDIA, PEMERINTAH, DAN PUBLIK (ANALISIS FRAMING DAN STRUKTURASI PADA MAJALAH TEMPO)

Daniel Deha<sup>1</sup>, Mulharnetti Syas<sup>2</sup>

Ilmu Komunikasi, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Indonesia

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan mengkaji relasi antara media, pemerintah, dan publik dalam pemberitaan Majalah Tempo tentang Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan deskriptif-kualitatif, peneliti membedah permasalahan penelitian ini melalui metode analisis teks framing model Robert N. Entman dan teori strukturasi Anthony Giddens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketimpangan relasional dan struktural antara media, pemerintah, dan publik terkait RUU KPK. Pemerintah cenderung mereproduksi RUU KPK sebagai media kekuasaan dengan menggunakan sumber daya ekonomi dan politik untuk menciptakan struktur dominasi pada publik. Sementara media menyoroti secara tajam dominasi pemerintah dengan membeberkan sejumlah fakta dan argumentasi yang memperlihatkan kekeliruan pemerintah.*

**Kata kunci:** Framing; Media, pemerintah, dan publik; Relasi; Strukturasi

### ABSTRACT

*This research aims to study the relationship between the media, the government, and the public in Majalah Tempo reporting on the revision of the Law 32 of 2002 on Corruption Eradication Commission (CEC). By using constructivist paradigms and descriptive-qualitative approaches, researchers dissect the problems through Robert N. Entman's framing text analysis method and used Anthony Giddens's structuration theory to find out the structural relations of three entities. The results showed that there were relational and structural disparities between the media, the government, and the public related to the CEC Bill. The government tends to reproduce the CEC Bill as a medium of power by using economic and political resources to create a structure of dominance to the public. Meanwhile the media sharply highlighted the dominance of the government by exposing a number of facts and arguments that show the government's blunder.*

**Keywords:** Framing; Media, government, public; Relation; Structuration

### PENDAHULUAN

Penggambaran wajah Presiden Joko Widodo dengan siluet hitam serupa Pinokio pada *cover* Majalah Tempo (selanjutnya ditulis TEMPO) edisi 16-22 September 2019 menuai kontroversi dan protes keras dari sekelompok massa dan

elit partai pendukung Jokowi. Mereka menganggap ilustrasi tersebut sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Tidak saja meminta pertanggung jawaban, mereka bahkan melaporkan TEMPO ke Dewan Pers (Prabowo, 2019). Sebagai produk media massa,

majalah memang paling banyak menyajikan foto dan gambar yang menarik pembaca (Kusumastuti dan Diana, 2016). Selain foto atau gambar pada rubrik yang mewakili isi, majalah juga menampilkan foto *cover* yang menarik dan memiliki makna mewakili isinya (Yunus, 2010). *Cover* ibarat pakaian dan aksesoris pada manusia (Ardianto, 2007). Menurut Morrish (1996), *cover* majalah adalah alat penjualan yang paling menonjol dan berguna. Survei Morrish menemukan, banyak pembaca lebih memilih *cover* yang menarik. Rolnicki, et al (2008) mengatakan, salah satu ciri khas dari majalah berita adalah desain sampulnya.

TEMPO menggambarkan Jokowi dengan siluet pinokio karena menilai bahwa Presiden dua periode tidak bisa merawat komitmen pemberantasan korupsi yang menjadi platform utama kebijakannya sejak terpilih menjadi Presiden pada 2014. TEMPO melihat perubahan komitmen itu ketika Jokowi menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) KPK. Langkah tersebut tidak hanya akan menciderai lembaga antikorupsi yang berdiri tahun 2002 itu, melainkan juga akan menyuburkan praktik-praktik korupsi yang masif ke

depannya. Di satu sisi, Presiden Jokowi ingin memperkuat KPK, namun di sisi lain ia justru menyetujui RUU KPK yang jelas-jelas memperlemah dan memangkas independensi dan kewenangan KPK.

TEMPO tidak hanya berbicara atas namanya sebagai media massa, namun sebagai media komunikasi massa, TEMPO berbicara atas nama rakyat, atau yang disebutnya sebagai publik. Menurut Nimmo (2011), media massa dikatakan sebagai alat komunikasi massa karena menyajikan jenis khusus komunikasi yang melibatkan tiga perangkat: sifat khalayak, pengalaman komunikasi, dan komunikator. Dalam perangkat itu media massa menyampaikan pesan komunikasi dari satu-kepada-banyak dan kemudian menjadi proses penciptaan makna bersama antara media massa (komunikator) dan khalayaknya (Baran, 2012). Sebagai komunikasi massa, media menjadi “instrumen kekuasaan” untuk menarik perhatian umum, membujuk dan kepercayaan publik ataupun mempengaruhi perilaku, memberi status dan legitimasi, menjelaskan dan menyusun persepsi serta realitas sosial. Media massa juga

menjadi alat kontrol sosial bagi pemerintahan. Representasi kontrol media divisualisasikan melalui ragam produk informasi (Kusumastuti & Diana, 2016). Dalam komunikasi visual, bentuk-bentuk bahasa visual, seperti ilustrasi, karikatur atau cover, dirancang untuk menyampaikan pesan secara jelas kepada khalayak (Tinarbuko, 2008).

Secara hukum, sebagaimana dikatakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, TEMPO tidak melanggar kode etik jurnalistik dalam *cover* tersebut. *Cover* dengan judul “Janji Tinggal Janji” itu merupakan respon metaforis atas dinamika perihal RUU KPK. Karena itu, *cover* tersebut merupakan simbol kontrol terhadap pemerintahan. Dalam pemberitaannya, TEMPO secara terbuka membeberkan praktik *kongkalikong* antara pemerintah dengan anggota DPR, di mana Fraksi PDIP dan Golkar sebagai partai yang paling getol memperjuangkan RUU KPK.

Sepanjang perjalanannya, majalah yang terbentuk pada 1971 oleh Goenawan Mohamad dan teman-temannya memang terkenal sebagai media yang tajam mengkritik penyelewengan kekuasaan pemerintah.

Dikutip dari laman resminya (*tempo.id*), TEMPO bahkan sering dibredel rezim karena kritik-kritiknya yang keras. Setidaknya dua kali TEMPO dibredel rezim hingga pada 1998 kembali beroperasi secara normal setelah Soeharto lengser dari kekuasaan. Pembredelan pertama terjadi pada 1982 karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan kendaraan politiknya, Partai Golkar. Pembredelan kedua terjadi pada 21 Juni 1994 melalui Menteri Penerangan Harmoko karena dinilai terlalu keras mengkritik Habibie serta Soeharto ihwal pembelian kapal bekas dari Jerman Timur.

Sebagai majalah berita, TEMPO telah berhasil menggabungkan unsur aktualitas peristiwa mingguan dengan peliputan yang mendalam dan penulisan *feature*. Selain menjangkau pembaca yang ingin mendapat kedalaman pemberitaan dengan tingkat profesionalitas tertentu, TEMPO juga fokus pada isu *human interest* yang dalam sajiannya lebih menekankan pentingnya gambar, seperti foto, ilustrasi, dan infografis. Karena itulah TEMPO begitu enak dibaca dan perlu, seperti menjadi tajuk utama majalah ini.

Dalam pemberitaan yang kontroversial ini, ada tiga varian diskursus yang terdiferensiasi ke dalam tiga bingkai yang memperlihatkan relasi struktural kekuasaan, yaitu antara media, pemerintah, dan publik. Diferensiasi tersebut merujuk pada proses kesadaran demokrasi masing-masing struktur. Sebagai sebuah institusi, TEMPO tidak berada pada ruang kosong. Ia senantiasa berinteraksi dengan berbagai institusi luar, antara lain dengan masyarakat dan pemerintah. Dalam edisi 9-15 September 2019 dan 16-22 September 2019, TEMPO secara khusus menyoroti dan memperlihatkan konflik relasionalnya dengan pemerintahan Jokowi.

Penelitian ini bermaksud meletakkan masalah ini sebagai problem dalam struktur pemerintahan. Dalam konteks ini, pemerintah lebih bertindak sebagai representasi rakyat, sehingga tidak dilihat sebagai representasi negara semata karena dapat terjadi pemerintah ada tanpa negara. Dengan kata lain pemerintah hadir mendahului negara karena merupakan elemen yang mengkonstruksi negara secara abstraktif (Labolo, 2014).

Dalam persoalan melihat relasi tersebut sejatinya merupakan kajian

studi ekonomi politik tentang bagaimana pemerintah berusaha mempengaruhi praktik komunikasi melalui media. Hal ini seiring dengan pendapat Smythe tentang adanya relasi dialektik antara praktik komunikasi dan konstruksi sosial politik dalam masyarakat (Mosco, 1996).

Dalam perspektif komunikasi politik, media massa dalam fungsinya sebagai infrastruktur politik berperan sebagai media komunikasi politik. Kinerja media ini menuntut kualitas standar kelompok wartawan. Melalui berita-berita politik yang ditulis oleh kelompok wartawan, diharapkan terjadi proses pendidikan politik bagi publik. Dalam perspektif inilah, akan terlihat peluang dan hambatan media di Indonesia untuk merealisasikan dirinya sebagai bagian dari infrastruktur politik (Wahyuni, 2000).

Media dapat pula menjadi artikulasi kepentingan dan suara *pressure group* sekaligus berperan sebagai *pressure group* itu sendiri. Pada posisi ini media massa hadir sebagai *public watchdog* terhadap kecenderungan distorsi kekuasaan. Karenanya pemberitaan media massa tidak saja dapat menjadi alternatif

perlawanan terhadap kekuasaan, tetapi juga membantu *pressure group* untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan (Malay, 1999). Ini sejalan dengan fungsi pers sebagai kontrol sosial (Harsono, 2010). Namun, kerap terjadi, pemerintah menjadikannya sebagai media publik dari sebelumnya milik privat. Karena itu, dalam teori pers demokrasi sosial McQuail, pemerintah bisa mencampuri urusan media untuk melindungi demokrasi dari kecenderungan media melakukan konsentrasi atau oligopoli (Rusadi, 2015). Dalam kontroversi, pemberitaan TEMPO memperlihatkan adanya konflik struktural antara pemerintah dengan media. Teori strukturasi Giddens berupaya menunjukkan bahwa relasi struktur-agen dalam permasalahan ini adalah sebuah praktik sosial. Sebab media senantiasa berada dalam situasi dinamis, cair, dan prosedural. Dalam situasi tertentu media dapat mereproduksi artikulasi ideologis negara, namun ia juga bisa menciptakan strategi-strategi resistensi (Ashaf, 2006). Media memihak pemerintah apabila media patuh dan tidak mengambil jarak terhadap struktur. Namun, karena struktur juga bisa usang dan bisa dianggap tidak memadai lagi, maka

media, lewat kesadaran diskursif mampu berbalik mengoreksi struktur. Karena itu, agensi selalu mengandaikan adanya struktur karena struktur menyediakan sarana di mana agensi beroperasi. Giddens tidak lagi memandang struktur dan agensi sebagai dua hal yang terpisah, melainkan bekerja sebagai dualitas. Hubungan antara keduanya bersifat dialektis, dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi (*interplay*) secara terus-menerus (Hidayat, et.al, 2000).

Dalam kacamata Giddens, media massa dapat menjadi sumber daya yang mereproduksi kekuasaan dalam relasinya dengan pemerintah dan publik. Pertarungan tiga struktur ini memiliki tradisi yang unik di setiap negara, yaitu bagaimana pemerintah memperlakukan media, media memperlakukan publik, dan atau sebaliknya. Untuk menjelaskan relasi-relasi ini perlu analisis mendalam karena ketiganya mengembangkan imajinasi masing-masing mengenai kekuasaan (Dhakidae, 2003).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis sebagai analisis sistematis melalui pengamatan terhadap perilaku sosial dan mengelola dunia sosial (Morissan, 2009; Rusadi, 2015).

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau memecahkan permasalahan untuk menghasilkan data deskriptif dari objek yang diamati (Moleong, 2005). Dengan metode kualitatif peneliti berupaya memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta dari topik permasalahan (Mohamed, et.al, 2010).

Objek penelitian ini adalah empat berita pada TEMPO tentang RUU KPK yang diseleksi dari dua edisi, yaitu edisi 9-15 September 2019 dan 16-22 September 2019. Pemilihan berita ini dilakukan melalui metode *non random sampling*, yaitu *purposive sampling* (Sugiyono, 2010) berdasarkan kedalaman dan kedekatan isi pemberitaan dengan pokok permasalahan. Keempat berita tersebut, yakni 1) Dewan Pemberantasan Komisi (Sampel 1); 2) Presiden Joko Widodo: Saya Ingin KPK Lebih Kuat (Sampel 2); 3) Agus Rahardjo: Revisi UU Jelas Memperlemah KPK (Sampel 3); 4) Saatnya Sama-Sama Melawan (Sampel 4).

Peneliti menggunakan metode pengumpulan dokumentasi, berupa berita-berita pada dua edisi TEMPO.

Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk mendukung kajian teori sesuai penelitian dari buku, artikel, jurnal, tesis, dan media *online*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis framing Robert N. Entman. Ada empat komponen analisis framing Entman, yakni: 1) *define problems*, bingkai utama dari kerangka analisis framing, yaitu tentang bagaimana peristiwa dimaknai wartawan; 2) *diagnoses causes*, digunakan untuk menyingkap apa dan siapa aktor dari suatu peristiwa. Pendefinisian sumber masalah ini secara luas menyertakan juga siapa yang menjadi pelaku dan korban dari suatu peristiwa; 3) *make moral judgement* adalah elemen yang dipakai untuk membenarkan atau memberi pendasaran atau pilihan argumen moral wartawan atas definisi permasalahan suatu peristiwa; dan 4) *treatment recommendation* yaitu elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan; suatu jalan keluar atau tawaran solusi wartawan untuk menyelesaikan masalah (Eriyanto, 2002).

Entman juga menekankan dua perangkat dasar dalam analisis framing,

yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu. Tahap seleksi itu menyangkut pemilihan fakta: aspek mana yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak. Sementara itu, penonjolan aspek tertentu dari isu berhubungan dengan penulisan fakta, yaitu terkait pemilihan kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Melalui framing, perhatian terhadap aspek tertentu dari realitas politik menjadi penting sembari mengabaikan elemen lain yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi yang berbeda (Sobur, 2012).

Setelah melakukan analisis teks, peneliti melakukan analisis struktur berdasarkan teori strukturasi Giddens untuk memahami relasi antara media,

pemerintah, dan publik. Menurut Giddens, strukturasi menggambarkan suatu proses di mana struktur dibentuk dari agensi. Artinya, masyarakat dan individu saling menciptakan satu sama lain, dengan manusia adalah produk dari struktur yang dihasilkan oleh agensi sosial (Mosco, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti memetakan penelitian ini berdasarkan tahapan kerangka framing Entman. Pertama, membuat kerangka analisis berdasarkan komponen-komponen yang menjadi medan analisis framing Entman. Kedua, melalui seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari pemberitaan. Analisis komponen-komponen utama framing dipaparkan secara sederhana seperti berikut:

Tabel 1. Tabel analisis tahap I

<b>Sampel Berita</b>	<b>Define problems</b>	<b>Diagnose causes</b>	<b>Make moral judgment</b>	<b>Treatment recommendation</b>
Sampel 1	Pelemahan KPK	DPR	“Bila disahkan DPR dan pemerintah maka akan memperlemah kewenangan KPK”	membatalkan pembahasan revisi UU KPK
Sampel 2	Penguatan KPK	Presiden Jokowi	“Saya berharap semua pihak membicarakan isu ini dengan jernih, obyektif dan tanpa prasangka berlebihan”	Jokowi seharusnya membatalkan surat persetujuan RUU KPK ke DPR
Sampel 3	Pelemahan KPK	Presiden Jokowi	“Saya setuju dalam waktu dekat harus dilakukan perubahan sistem, prosedur disederhanakan, lebih transparan, dan menegakkan integritas”	Presiden Jokowi harus mendengarkan suara rakyat



Sampel 4	Pelemahan KPK	Presiden Jokowi dan DPR	“Dengan informasi yang akurat, rakyat harus bergerak membela KPK Jokowi tentu tak perlu berkali-kali meminta KPK memperbaiki aspek pencegahan atau menyalahkan KPK”
----------	---------------	-------------------------	--

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Selanjutnya, peneliti menganalisis penonjolan aspek-aspek tertentu. Berikut teks menggunakan seleksi isu dan ini paparan detail tahap-tahap tersebut.

Tabel 2. Tabel analisis tahap II

Sampel Berita	Seleksi Isu	Penonjolan Aspek Tertentu
Sampel 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal-pasal RUU KPK memperlemah KPK</li> <li>2. PDIP dan Golkar paling getol mendorong RUU KPK untuk mengamankan sejumlah kasus yang sedang menimpa kedua anggota partai</li> <li>3. RUU KPK memangkas kewenangan dan independensi KPK</li> <li>4. Menurut Presiden Jokowi KPK fokus pada upaya pencegahan</li> <li>5. Presiden Jokowi belum mengetahui isi RUU KPK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kalimat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DPR diam-diam bermaksud merombak UU KPK bersamaan dengan proses seleksi pemimpin lembaga antirasuah.</li> <li>b. Bertabur pasal yang akan mengebiri kewenangan KPK, rancnagan UU itu disiapkan sejak lama oleh PDI Perjuangan dan disetujui semua partai.</li> <li>c. Sejumlah narasumber menyatakan PDIP dan Golkar paling getol dalam mendorong revisi UU KPK.</li> <li>d. Bila disahkan DPR dan pemerintah, peraturan yang baru akan menumpulkan kewenangan KPK.</li> <li>e. Menurut Jokowi, agresifnya KPK memberantas korupsi membuat pejabat takut mengambil keputusan.</li> <li>f. Jokowi menyatakan belum mengetahui isi rancangan itu.</li> </ol> </li> <li>2. <b>Kata:</b> diam-diam, mengebiri, ujung tanduk, kasus suap kuota impor bawang putih, korupsi e-KTP, menumpulkan kewenangan, maraknya penangkapan oleh KPK, inisiatif DPR.</li> <li>3. <b>Citra:</b> DPR berkerja tidak transparan, menutupi kasus korupsi elit partai, penolakan Ketua KPK, Jokowi belum mengetahui isi draft RUU KPK</li> <li>4. <b>Gambar:</b> Wakil Ketua DPR Utut Adianto, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hartarto, Agus Rahardjo</li> </ol>
Sampel 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden Jokowi menyetujui pembahasan revisi UU KPK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kalimat</b></li> </ol>



2. Untuk memperkuat KPK

- a. Sehari sebelumnya, Presiden mengirimkan surat persetujuan untuk membahas RUU KPK kepada Dewan
  - b. Presiden menyetujui sejumlah hal dalam RUU tersebut. Diantaranya soal izin penyadapan dan perlunya dewan pengawas untuk KPK
  - c. Sikap Presiden membuat pimpinan KPK kecewa
  - d. Saya ingin KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi.
  - e. Saya ingin KPK kewenangannya lebih kuat dibanding lembaga lain
2. **Kata:** menyetujui, kecewa, kewenangannya lebih kuat, memiliki peran sentral
  3. **Citra:** Jokowi menyetujui RUU KPK, komit dalam pemberantasan korupsi
  4. **Gambar:** Presiden Jokowi

Sampel 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi UU KPK dilaksanakan tidak transparan</li> <li>2. Presiden Jokowi enggan merespon permintaan pembatalan revisi oleh KPK</li> <li>3. RUU KPK bukan prioritas Program Legislasi Nasional 2019</li> <li>4. KPK tidak independen jika berada di bawah koordinasi kementerian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kalimat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembahasan RUU KPK yang terkesan sembunyi-sembunyi dan terburu-buru menjadi alasan para pemimpin Komisi menyerahkan mandat tersebut kepada Presiden Jokowi</li> <li>b. Dalam surat tersebut antara lain disampaikan bahwa poin-poin revisi akan memperlemah KPK</li> <li>c. Presiden Jokowi menandatangani surat Preside terkait dengan revisi tersebut</li> <li>d. Kita tak bisa hanya bergantung pada pencegahan karena sejarah korupsi di negeri ini panjang</li> <li>e. Sebab, begitu berada di bawah satu koordinasi menteri, semestinya posisinya tidak bisa lagi independen</li> </ol> </li> <li>2. <b>Kata:</b> terkesan sembunyi-sembunyi, terburu-buru, kecewa, gayung tak bersambut, ada usaha melemahkan, tidak menjadi prioritas Program Legislasi Nasional 2019, tidak lagi independen</li> <li>3. <b>Citra:</b> KPK mencurigai ketidaktransparanan DPR dan Presiden membahas RUU KPK, Jokowi tidak merespon permintaan pimpinan KPK, KPK masih berharap kebijaksanaan Presiden, tugas dan wewenang KPK tidak hanya pada pencegahan, tapi juga pada</li> </ol>
----------	---	---

penindakan, KPK akan diperlemah secara struktural

4. **Gambar:** Agus Rahardjo, Agus Rahardho dan tim penyidik

Sampel 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPK membutuhkan dukungan rakyat yang masih</li> <li>2. Presiden Jokowi dan DPR telah mengebiri KPK lewat revisi UU KPK</li> <li>3. Revisi UU KPK semestinya memperkuat daya jangkau KPK</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kalimat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tak ada pilihan lain: semua elemen masyarakat sipil harus bergerak bersama membela Komisi Pemberantasan Korupsi.</li> <li>b. Tanpa perlawanan masih dari publik, rencana Presiden Joko Widodo dan ndirian dan kewenangan KPK akan berjalan tanpa hambatan</li> <li>c. Sejak awal, proses revisi itu terkesan diam-diam dan tergesa-gesa</li> <li>d. Wajar jika publik curiga ada agenda terselubung mematikan KPK</li> <li>e. Tak berlebihan kiranya jika publik menilai Presiden sudah jatuh dalam perangkap oligarki di sekelilingnya</li> <li>f. Kepercayaan Jokowi kepada KPK melambungkan harapan publik</li> <li>g. Parahnya korupsi di Indonesia dipicu oleh lemahnya sistem peradilan dan buruknya akuntabilitas pendanaan partai politik</li> <li>h. Masyarakat sipil perlu mendorong semua warga negara agar berbondong-bondong menyampaikan aspirasi mereka kepada parlemen</li> </ol> </li> <li>2. <b>Kata:</b> perlawanan publik, mengebiri, diam-diam, oligarki, perubahan sikap dan komitmen, korupsi tak kunjung membaik, memperkuat daya jangkau, semua warga negara, aspirasi</li> <li>3. <b>Citra:</b> Perlu menggugah komitmen pemberantasan korupsi Jokowi, Jokowi telah terperangkap oligarki, Jokowi tidak lagi seperti periode sebelumnya, semua warga negara punya andil untk mendesak aspirasinya</li> <li>4. <b>Gambar:</b> Jokowi pinokio</li> </ol>
----------	--	---

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Berdasarkan analisis teks, peneliti menemukan bahwa TEMPO lebih menyoroti upaya pelemahan KPK yang dilakukan penuh intrik oleh para anggota

DPR, khususnya dari fraksi PDIP dan Golkar, dua partai yang dianggap paling getol memperjuangkan RUU KPK. RUU KPK yang semestinya dibahas DPR

dalam rapat Badan Legislasi tidak dilakukan secara transparan, melainkan secara diam-diam dan tergesa-gesa.

Menurut TEMPO, ada dua alasan mengapa para politisi kedua fraksi begitu masif mendorong percepatan pembahasan RUU KPK. Salah satunya adalah terkait dengan kasus kuota impor bawang putih yang melibatkan mantan anggota Komisi Perdagangan DPR dari fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra, yang ditangkap KPK pada 9 Agustus 2019. Kasus lainnya adalah perkara e-KTP yang melibatkan sejumlah petinggi partai Golkar yang merasa belum aman, setelah Setya Novanto dan Markus Neri dijebloskan ke penjara.

TEMPO menilai, DPR menafsir secara keliru pernyataan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 2019. Kala itu, Jokowi mengkritik gencarnya KPK melakukan operasi tangkap tangan. Menurut Jokowi, aksi tersebut tidak efektif karena indeks persepsi korupsi hanya naik satu persen. Karenanya, Jokowi menghendaki agar KPK fokus pada upaya pencegahan. Pernyataan ini ditangkap anggota DPR sebagai pembicaraan politik untuk merevisi UU KPK. Ketika keputusan ada di tangannya, Jokowi cenderung

menghindar dengan menyatakan tidak mengetahui isi RUU KPK.

Untuk mendukung objektivitas pemberitaan, TEMPO mewawancarai Ketua KPK Agus Rahardjo dari kalangan profesional yang mewakili golongan elit dengan publik (Nimmo, 2011). Ia menilai, RUU KPK akan mengirim lembaga antirasuah itu ke jurang. Pembentukan Dewan Pengawas dan RUU KUHP akan mengurangi kewenangan dan independensi KPK. Dengan tetap berharap pada pertimbangan yang matang Presiden, Agus menolak argumentasi yang mengatakan bahwa KPK hanya fokus pada upaya penindakan. Selama ini, KPK memilih sistem pencegahan, salah satunya lewat kurikulum pendidikan dan aplikasi JAGA. Karena itu, Jokowi perlu mendengar pendapat ahli hukum, atau perguruan tinggi agar memiliki basis pertimbangan yang lebih terukur dalam menentukan kebijakan.

Selain itu, TEMPO juga mewawancarai Jokowi pada 11 September 2019. Sebagai Presiden sekaligus politikus (Nimmo, 2011), Jokowi menginginkan agar KPK menjadi lembaga yang lebih kuat dari lembaga lain. Namun pada praktiknya,

Jokowi menyetujui RUU KPK meski ia memiliki waktu hingga 60 hari untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Hal itu memperlihatkan inkonsistensi Jokowi karena tekanan dari pihak lain.

Pada akhirnya, TEMPO berdiri sebagai “alat kontrol” yang menyerukan perlawanan terhadap keputusan Jokowi menyetujui RUU KPK. TEMPO menilai Jokowi tidak konsisten pada komitmen awalnya ketika pertama kali menjabat sebagai Presiden tahun 2014. Jokowi tidak hanya memperlemah KPK tapi serentak menutup telinga terhadap suara rakyat yang bergelora menentangnya. Bagi TEMPO, kekuasaan terakhir ada di tangan rakyat, karena sesuai asas demokrasi, aspirasi rakyat patut didengar. Apalagi, rakyatlah yang mengusungnya naik ke periode kedua sebagai Presiden.

Menanggapi ketidakkonsistenan Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK, TEMPO edisi 16-22 September 2019 menurunkan tajuk “Janji Tinggal Janji” dengan *cover* wajah mirip Jokowi dengan siluet hitam di sampingnya seperti Pinokio. Dalam subjudul itu, tertulis “Para pegiat antikorupsi menuding Presiden ingkar janji perihal penguatan KPK. Benarkah sejak awal

Jokowi mendukung Ketua Komisi terpilih?” Diskursus tentang *cover* diulas dalam rubrik Opini berjudul “Saatnya Sama-Sama Melawan”.

Ilustrasi pada *cover* itu secara semiotis tentu beralasan untuk memperkuat basis argumentasi TEMPO. Simbol pengingkaran itu secara satire dilukiskan sebagai ‘wajah pinokio’. Dalam ulasannya, TEMPO menilai Jokowi telah berbohong pada rakyat yang telah memilihnya. Berbohong yang dimaksudkan TEMPO adalah sikapnya yang kontradiktif dengan Nawacita, komitmen pemberantasan korupsi, dan ketidaktransparanannya terkait RUU KPK. Jokowi dianggap mengabaikan publik dan lebih percaya pada elit pendukungnya. Sebagaimana boneka Pinokio akan memanjang hidungnya jika berbohong, Jokowi pun digambarkan demikian menurut TEMPO.

### **‘Interplay’ Struktur dan Agensi**

Institusi sosial terdiri dari konstitusi bersama struktur dan agensi, yang diproduksi, direproduksi dan ditransformasi melalui aturan sosial untuk membentuk perilaku para agennya. Dengan kata lain, manusia adalah produk dari struktur yang merupakan tindakan sosial atau

menghasilkan agensi. Mengutip Marx, manusia memang membuat sejarah, tetapi tidak hidup dalam kondisi dari buatan kita sendiri (Mosco, 2009).

Menurut Giddens, struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen manusia. Sementara agensi merupakan perilaku atau kegiatan manusia yang diarahkan oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu terjadi. Agen atau pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam arus kontinu antara tindakan dan peristiwa (Nashir, 2012). Ada *interplay* yang tak terhindarkan antara keduanya. Hal ini karena Giddens melihat struktur merupakan hasil sekaligus medium praktik sosial.

Dalam penelitian ini, peneliti membuat penegasan bahwa yang bertindak sebagai struktur adalah UU KPK, sedangkan agensi adalah media, pemerintah dan publik. Namun dari hasil penelitian, tampak bahwa struktur telah direproduksi sebagai media kekuasaan pemerintah dengan menggunakan sumber daya ekonomi dan politik untuk menciptakan struktur dominasi pada media dan publik. Sebagaimana menurut Giddens, sumber daya dapat menjadi media kekuasaan pada tataran praktis sekaligus media struktur dominasi yang

direproduksi (Karnaji, 2009). Ikhtiar RUU KPK dijadikan alat pemerintah untuk mengorganisasi relasi dominatif dan legitimatif dengan publik.

Sebagai *dialectic of control*, tampak bahwa TEMPO hadir untuk menarik perhatian umum, membujuk opini dan kepercayaan publik ataupun mempengaruhi perilaku, memberi status dan legitimasi, menjelaskan dan menyusun persepsi tentang kisruh RUU KPK. Sebagai agensi, TEMPO meninggalkan struktur baru (pemerintah) dan tidak mau tunduk pada struktur itu. TEMPO hadir sebagai alat kontrol. Representasi kontrol disampaikan melalui ragam informasi, terutama lewat berita dan ilustrasi *cover* yang keras.

Hal ini berpijak pada konsep dualitas struktur Giddens yang tidak memisahkan struktur dan agensi. Setiap perubahan komitmen dalam struktur akan mempengaruhi agensi. Apalagi dalam struktur yang telah mengalami keusangan dan terus menerus mengalami delegitimasi karena tidak mampu lagi memberi ruang bagi praktik-praktik sosial yang dinamis bagi agen.

Memang kita melihat bahwa struktur politik dan ekonomi telah

banyak berubah sejak era Reformasi. Dalam era ini, ada kebangkitan untuk menyongsong demokrasi yang menyebabkan infrastruktur dalam masyarakat seperti kelompok penekan, media, dan mahasiswa mengawasi suprastruktur yang mungkin kembali otoriter. Ini berbeda dengan era sebelumnya, di mana agen atau media massa cenderung direpresi dan dibungkam oleh rezim. Struktur kapitalis dan *top-down* yang melingkupi pemerintah kala itu meminggirkan suara-suara agen yang lebih sosialis dan populis (Wahyuni, 2000). Jackson & Lucian (1978) menggambarkan kondisi komunikasi politik Orde Baru sebagai produk kebijakan politik dari rezim *bureaucratic politics*. Di bawah Soeharto, keputusan-keputusan politik dibuat dengan mengabaikan kepentingan publik.

Dalam pemberitaan TEMPO, terlihat bahwa pemerintah keluar dari aturan yang disepakati bersama dari sebuah agensi sosial, yaitu UU KPK. Pemerintah cenderung otoriter dan tidak transparan, bahkan mengabaikan intervensi publik. Pemerintah lebih berpihak pada kelompok kepentingan di lingkaran suprastruktur yang bekerja

menurut logika instrumentalistik. Hal ini memunculkan wacana pendelegitimasi struktur karena dianggap kaku dan usang.

Selain itu, struktur baru pun tidak menyediakan sarana yang memungkinkan agensi beroperasi dengan dinamis, yaitu apa yang Habermas sebut sebagai ruang publik demokratis (Wahyuni, 2000). Sejatinnya, ruang publik demokratis memungkinkan publik ikut serta dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dalam kasus ini, pemerintah tidak mendukung iklim tersebut dengan tidak melibatkan publik untuk menyusun pilihan kebijakan terkait RUU KPK yang lebih kompatibel dengan iklim demokrasi.

Sebaliknya, dari framing pemberitaan TEMPO, agensi cenderung mengerasi struktur dominasi baru dengan tetap mengusung prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan menjaga marwah publik. Hal itu berpijak pada ideologi TEMPO yang tidak semata-mata media komunikasi politik, tetapi juga merupakan instrumen kekuasaan yang merepresentasikan kepentingan publik dalam merawat aras demokrasi. Dalam tataran ini, media dan publik sejatinya menjadi lebih dominan dalam

menentukan kebijakan, tidak semena-mena milik pemerintah. Bagi publik, merevisi UU KPK berarti melemahkan kinerja dan ruang lingkup lembaga itu. Bila sudah lemah, maka KPK akan mudah diintervensi kepentingan politik pemerintah.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan adanya struktur dominasi terhadap agen dalam memutuskan perevisian UU KPK. Agen dinilai tidak memiliki kuasa dan posisi tawar, yang memungkinkan adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi yang intens dan terbuka. Ketidakuasaan agen ini dipicu oleh manifestasi dominasi struktur dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintah beralih akan memperkuat KPK, tetapi nyatanya secara tertutup menyetujui RUU KPK. Ketimpangan kuasa ini menstimulasi TEMPO untuk memberikan perlawanan melalui ilustrasi sarkastik “Pinokio”.

Secara gamblang agen tidak netral, melainkan menunjukkan keberpihakannya pada akuntabilitas struktur (UU KPK). Agen hadir sebagai wakil publik, pengkritik pemerintah, penganjur kebijakan, serta “anjing penjaga” yang santun (McQuail, 2011). Sesuai pembagian Weaver dan Wilholt

(McQuail, 2011), peranan media terlihat lebih dominan ‘melawan’ ketimbang sebagai penyebar informasi. TEMPO mereproduksi struktur baru untuk membentuk kekuatan representatif dalam menyuarakan kegelisahan publik terhadap komitmen Presiden Jokowi.

Karena itu, pemerintah diharapkan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi politik secara transparan dan akuntabel agar publik dapat mengoreksi dan mengontrol secara bebas dan independen. Agen yang berinteraksi secara berulang-ulang dapat saja memproduksi struktur baru jika merasa tidak puas dengan struktur yang sudah ada.

### **Relasi Media, Pemerintah, dan Publik**

Dalam sejarah komunikasi politik media di Indonesia, relasi ketiga entitas kekuasaan ini terbilang rumit. Hal itu tentu beriringan dengan perubahan dan dinamika politik yang terjadi di Indonesia, yang setidaknya terbagi ke dalam tiga periode penting: Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Tiap pembabakan ini memiliki narasi yang berbeda dalam melihat relasi antara ketiganya. Ini memantulkan kenyataan bahwa pada hakikatnya relasi ketiga entitas ini terus berubah akibat kondisi



politik yang juga masih belum stabil dan terus bertransformasi.

Dari hasil penelitian, ada beberapa bentuk relasi yang terungkap dalam pemberitaan RUU KPK. *Pertama*, media sebagai “anjing penjaga” (McQuail, 2011). Fungsi media sebagai *watchdog* ini dikembangkan di Amerika Serikat pada abad ke-20, seolah menjadi bentuk revisi terhadap teori-teori pers sebelumnya yang menganggap keberpihakan dan tanggung jawab media terhadap kepentingan publik sangat minim. Peran ini mengandaikan bahwa pers sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat, yang jika tidak diawasi dapat melakukan monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan politik, budaya maupun ekonomi.

Relasi yang terpantul dari konsep ini menjadikan media sebagai “anjing penjaga” yang penting, terutama di tengah kondisi Indonesia yang sedang mengalami proses transisi dan mencari bentuk demokrasi. Konsep ini berakar pada gagasan liberal klasik tentang hubungan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dalam negara demokratis tentang *the fourth estate*

yang dikemukakan oleh Edmund Burke yang menempatkan pers sebagai kekuatan keempat di samping tiga pilar penting demokrasi yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sebagai kekuatan keempat, TEMPO melakukan peliputan dengan membeberkan fakta-fakta tak terduga tentang latar pembahasan RUU KPK yang terjadi di DPR dan Jokowi. Para jurnalis TEMPO melakukan wawancara langsung untuk mengetahui dan menggali settingan kekuasaan yang ada di balik pembicaraan politik tersebut. Dengan liputan investigasi yang mendalam dan kredibel, TEMPO tidak berniat membeberkan fakta-fakta, tetapi juga serentak membentuk forum publik yang inklusif untuk menanggapi pelaporannya. Membongkar dapur produk hukum, politik dan ekonomi di balik dua kekuatan: DPR dan Presiden Jokowi, merupakan sebuah upaya pengawasan yang boleh dibilang merupakan pekerjaan seekor “anjing penjaga” yang santun, namun tajam dan menitik.

Protess dkk. (Putra, 2015) mengidentifikasi tiga dampak dari peran pers sebagai *watchdog*. Pertama, dampak deliberatif, yaitu dampak pada

terbangunnya kemauan pemerintah untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusinya. Kedua, dampak individual berupa sanksi pemecatan atau pemakzulan dari jabatan ketika dilakukan oleh seorang pejabat bahkan Presiden sekalipun. Ketiga, dampak substantif bila terjadi perubahan-perubahan kebijakan, peraturan, prosedur, atau pemerintah sebagai hasil pelaporan investigatif.

Dampak ini tidak terjadi pada relasi antara media dengan pemerintah dalam pemberitaan TEMPO. Pemerintah justru berjalan mulus membahas dan menyetujui RUU KPK dengan DPR tanpa diketahui publik. Karena itu, penggambaran Jokowi dengan siluet pinokio pada *cover* TEMPO merupakan instrumen kekuatan bagaimana media tampil sebagai “anjing” yang menggonggong penyalahgunaan kekuasaan dan authoritarianisme.

Kedua, media sebagai wakil publik (McQuail, 2011). Dalam pemberitaan TEMPO tampak jelas bagaimana posisi keterwakilan media yang berpihak pada publik, terutama dalam Berita D: “Saatnya Sama-Sama Melawan”. Dalam tulisan ini, TEMPO berdiri pada posisi sebagai publik yang usang, terlupakan

dan tak lagi memiliki sumber daya otoritatif yang kuat di hadapan pemerintah. TEMPO berbicara dan bersuara menentang penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan pemerintah dari komitmen dasar untuk memberantas korupsi sebagaimana tertera dalam janji-janji dan program strategisnya. Berdiri lebih tinggi dari posisi semula, TEMPO berteriak keras, seperti seorang *transmitter*, yang berusaha menggerakkan publik untuk secara masif mendesak pemerintah menunda, bahkan membatalkan RUU KPK.

Bagi TEMPO, gerakan masyarakat itu bukan semata-mata karena merasa utang budi yang belum terbayarkan, melainkan lebih sebagai upaya menjaga marwah politik yang jujur, terbuka, adil dan bijaksana. Media di sini tidak lagi menjadi milik kelompok dominan dalam struktur media itu sendiri, seperti pemilik media atau pengiklan, melainkan sungguh-sungguh merupakan corong yang membentuk struktur opini publik untuk melawan pemerintah.

Dalam hal ini media dapat menjadi instrumen artikulasi kepentingan dan suara berbagai *pressure group* sekaligus sebagai *pressure group* itu sendiri. Dua

peran ini sekaligus menyatu bagi media. Pemberitaan media massa tidak saja dapat menjadi alternatif perlawanan terhadap kekuasaan, tetapi sekaligus membantu *pressure group* lain untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan.

Ketiga, media sebagai penganjur kebijakan (McQuail, 2011). TEMPO secara detail dan mendalam mengurai permasalahan RUU KPK dengan menampilkan berbagai pernyataan dan opini dari tokoh-tokoh penting, antara lain tokoh profesional dari KPK, aktivis, dan ia sendiri sebagai satu struktur baru yang direproduksi bersamaan dengan menyeruaknya kasus tersebut. Melalui argumentasi-argumentasi yang tajam dan kredibel, TEMPO menyajikan basis-basis pilihan kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah argumentasi yang ditawarkan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Tidak hanya itu, TEMPO sendiri memberi banyak masukan dengan membeberkan sejumlah kelemahan dan cacat hukum bilamana RUU KPK benar-benar disahkan. Beberan tersebut sejatinya dapat menjadi alternatif kebijakan yang memantapkan komitmen

pemerintah dalam menumpas matarantai korupsi.

Keempat, media sebagai instrumen pemerintah. Bentuk relasi terakhir ini diperlihatkan dalam wawancara TEMPO dengan Jokowi. Meski menampilkan kritik tajam terhadap pemerintah, TEMPO secara proporsional memberikan ruang bagi pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik terkait RUU KPK. Dengan itu, TEMPO tidak sungguh-sungguh membentuk suatu struktur yang sama, meski struktur pemerintah dianggap usang, karena dengan melaporkan pemberitaan itu, ada dualitas struktur dan agensi yang terjadi di antara keduanya. TEMPO tidak selalu berpihak pada publik atau struktur yang dibentuknya. Dalam hal ini, TEMPO hadir sebagai agensi yang ingin berproses secara terus-menerus dalam ruang dan waktu dengan struktur yang dilawannya.

### **Konflik Struktural**

Teori konflik dikemukakan Dahrendorf yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat proses perubahan. Begitu pula pada setiap sistem sosial terdapat pertentangan dan konflik sosial. Ada superordinasi dan

subordinasi, dengan posisi superordinasi memiliki otoritas mengendalikan kelompok subordinat (Rusadi, 2015). Otoritas ini tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi individu tersebut. Bagi Dahrendorf sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi mendominasi atau ditundukkan (Dahrendorf, 1959).

Dalam pemberitaan TEMPO, tampak media dan publik merupakan kelompok subordinat, sementara pemerintah sebagai superordinat. Media dan publik seperti tidak memiliki kuasa di hadapan pemerintah yang memiliki otoritas dan kuasa yang kuat. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang ini menyebabkan konflik struktural yang tajam antara media dan publik dengan pemerintah. Penggambaran wajah Jokowi Pinokio pada *cover* merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi dan intervensi berlebihan pemerintah terhadap kepentingan publik dalam membangun budaya politik yang bebas korupsi. Pemerintah dinilai tidak responsif menghadapi persoalan yang mengemuka di ruang publik dan cenderung bersikeras terhadap protes luas dari masyarakat. Namun di sisi lain,

pemerintah tampak lentur terhadap lingkaran elit.

Pemerintah tentu memiliki kepentingan yang berbeda dengan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Persetujuan yang tergesa-gesa terhadap RUU KPK menunjukkan bahwa rezim lebih mendahulukan kepentingan elit partai ketimbang rakyat. Dengan menundukkan kepentingan publik, pemerintah seolah mengkapitalisasi RUU KPK sebagai momentum menarik basis dukungan dari DPR dan elit partai. Hal ini tentu berbeda dengan kepentingan publik yang melihat pemberantasan korupsi mutlak dilakukan.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan diskusi, peneliti menarik beberapa kesimpulan. Pertama, TEMPO membingkai pemberitaan tentang RUU KPK sebagai upaya pelemahan KPK. DPR dan Presiden Jokowi bekerjasama untuk membatasi kewenangan dan mengurangi independensi KPK lewat sejumlah pasal yang nyata-nyata memberangus kinerja lembaga antikorupsi itu dalam memberantas korupsi. Berbagai intrik dilakukan kedua elit politik itu untuk

membenamkan kontrol publik terhadap jalannya pembahasan RUU KPK. Bagi publik, RUU KPK justru melanggengkan praktik yang lebih masif bagi koruptor.

Kedua, TEMPO secara tajam menggambarkan kinerja pemerintah dalam pembahasan RUU KPK sebagai “pinokio”. Term ini digunakan untuk melukiskan perubahan komitmen Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi. Presiden dua periode dinilai telah berbohong kepada publik karena tidak memenuhi janji pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ketiga, *interplay* antara struktur dan agensi dalam pemberitaan TEMPO memperlihatkan adanya jarak yang belum terjembatani antara keduanya. Struktur cenderung beroperasi di luar praktik sosial yang menjadi konvensi. Sementara agen terus berupaya mendesak struktur menciptakan ruang publik yang demokratis dalam membahas RUU KPK.

Keempat, pemberitaan TEMPO menunjukkan konflik relasional dan struktural antara media, pemerintah dan publik. Konflik terjadi karena ketiganya cenderung memiliki imajinasi dan kepentingan masing-masing tentang

pemberantasan korupsi. Pemerintah hadir sebagai lembaga yang dominan dan otoriter dengan tidak melibatkan publik secara luas. Sementara media berpendirian untuk tetap mengawas dan mengontrol proses pembahasan RUU KPK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro, dkk. (2007). *Komunikasi Massa. Sebuah Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ashaf, A. F. (2006). Pola Relasi Media, Negara, Dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif". *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 8, No.
- Baran, S. (2012). *Pengantar Komunikasi Massa Melek Media dan Budaya* (Jilid 1 Ed). Jakarta: Erlangga.
- Barus, S. W. (2010). *Jurnalistik. Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Craib, I. (1992). *Anthony Giddens*. London: Routledge.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. London: Routledge.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Effendy, O. U. (2011). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing. Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.

- Hafifah, N. U. (2016). <https://www.academia.edu/sejarah-dan-perkembangan-majalah/>, Universitas Negeri Yogyakarta,.
- Harsono. (2010). *Perencanaan Kegawayaan*. Bandung: Fokusmedia.
- Hidayat, D. N. et. al. (2009). *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karl D' Jackson dan Lucian W. Pye. (1978). *Political Power and Communications in Inclonesra*. Berkeley dan Los Angeles: University of Califomia Press.
- Karnaji. (2009). *Sektor Informal Kota: Analisis Teori Strukturasi Giddens (Kasus Pedagang Pasar Keputran Kota Surabaya)*, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Thn. XXII. No. 4, Oktober–Desember 2009.
- Kusumastuti, Retno Dyah dan Diana, M. (2016). "Analisis Semiotika Pada Cover Majalah Tempo. *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Kusumastuti, R. D. & M. D. (2016). "Analisis Semiotika Pada Cover Majalah Tempo Edisi Tanggal 23 Februari-1 Maret 2015." *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10 (No. 2).
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Malay, A. (penyunt. (1999). *Menuju Masyarakat Kewargaan*. Yogyakarta: LP3Y.
- McQuail, D. (1991). *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga. Jakarta: Erlangga.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa McQuail* (6th ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Mohamed, Z. M. et. al. (2010). *Tapping New Possibility in Accounting Research, in Qualitative Research in Accounting, Malaysian Case* (Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Ed.). Kuala Lumpur.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan, M. A. (2009). *Teori Komunikasi Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Morrish, J. (1996). *Magazine Editing*. New York: Routledge.
- Mosco, V. (1996). *The Political Economy of Communication. Rethinking and Renewal*. London: SAGE Publications Inc.
- Mosco, V. (2009). *The Political Economy of Communication*, (2nd Editio). London: SAGE Publications Inc.
- Nashir, H. (2012). "Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens". *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol.7, No.
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, H. (2019). "Jokowi Mania' Adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers."
- Priyono, B. H. (2002). *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Putra, I. G. N. (2015). *Memahami Peran Media sebagai "Watchdog" dan Masalahnya di Indonesia*.

- Rolnicki, Tom E., et al. (2008). *Pengantar Dasar Jurnalistik (Scholastic Journalism)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusadi, U. (2015). *Kajian Media, Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sobur, A. (2012). *Analisis Teks Media. Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Straubhar, J., La Rose, R., & Davenport, L. (2012). *Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swantoro, P. (2002). *Dari Buku ke Buku, Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tinarbuko, S. (2008). *Semiotika Komunikasi Visual*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Wahyuni, H. I. (2000). *Wahyuni, Hermin Indah. 2000. Televisi dan Intervensi Negara*. Yogyakarta: Media Pressindo. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wibowo, I. (2000). *Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Rakyat Cina*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.